

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19  
TAHUN 2014 TENTANG KEPEMUDAAN (STUDI KASUS  
PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN).**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Sains dalam Program Studi Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Diajukan oleh :**

**RAHMAT HIDAYAT**

**NIM. 07012622327011**

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR  
19 TAHUN 2014 TENTANG KEPEMUDAAN  
(STUDI KASUS PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN).

Nama Mahasiswa : **RAHMAT HIDAYAT**

NIM : 07012622327011

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,

Dr. Andries Lionardo, M.Si.  
Pembimbing Pertama

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.  
Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik






Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.  
NIP. 19780512 200212 1 003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 19660122 199003 1 004

### HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI


Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG  
KEPEMUDAAN (STUDI KASUS PELATIHAN  
KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS PEMUDA  
DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA  
SELATAN).  
Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat  
NIM : 07012622327011  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Tanggal Ujian : 20 Desember 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Andries Lionardo, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Slamet Widodo, MS., MM.	Anggota	
4	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.	Anggota	
5	Dr. Muhammad Abduh, M.Si.	Anggota	

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Alfitri, M.Si.  
NIP. 19660122 199003 1 004

Palembang, Desember 2024  
Menyetujui,  
Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik

  
Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.  
NIP. 19780512 200212 1 003

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 07012622327011  
Tempat / Tanggal lahir : Air Batu, 12 Agustus 2000  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG KEPEMUDAAN (STUDI KASUS PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Desember 2024  
Yang Menyatakan,

  
**Rahmat Hidayat**  
NIM. 07012622327011

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 07012622327011  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG KEPEMUDAAN (STUDI KASUS PELATIHAN  
KEWIRAUSAHAAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN)”**.

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang  
Pada Tanggal : Desember 2024  
Yang Menyatakan,



**Rahmat Hidayat**  
NIM. 07012622327011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan (Studi Kasus Pelatihan Kewirausahaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)". ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian kewirausahaan dan kebijakan kepemudaan, serta memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2014 dalam konteks pemerintah daerah. Dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak dapat berjalan sendiri. Berbagai pihak telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Adapun pihak-pihak yang perlu penulis sampaikan rasa terima kasihnya adalah sebagai berikut:

1. **Allah SWT** , yang telah memberikan berkah kesehatan dan ilmu yang bermanfaat.
2. **Kedua Orang Tua saya** , yang selalu memberikan segala bentuk dukungan dan bantuan, memberikan Arahan dan nasihat yang membangun, serta kasih sayang yang tak tersampaikan kepada saya.
3. **Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si** , selaku Rektor Universitas Sriwijaya, yang telah menciptakan lingkungan kampus yang sehat, inklusif, dan mendukung perkembangan akademik.
4. **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si** , selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yang memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan program studi dan mahasiswa.
5. **Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si** , selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, juga selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengajar, dan mengurus saya selama proses perkuliahan berlangsung.
6. **Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si** , selaku Dosen Pembimbing Pertama saya yang telah membimbing serta memberikan masukan, Arah, dan saran selama proses pengerjaan tesis.
7. **Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** , selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang telah membimbing serta memberikan masukan, Arah, dan saran selama proses pengerjaan tesis.
8. **Seluruh dosen program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya** , terima kasih atas ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. **Seluruh staf program administrasi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya** , terima kasih atas pelayanan serta kesabaran dalam membantu saya mengurus berbagai keperluan yang diperlukan, seperti surat akademis dan surat perizinan serta informasi penting mengenai perkuliahan.

10. **Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Rudi Irawan, S.Sos., M.Si.** beserta seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dan membantu selama proses penelitian.
11. **Narasumber-narasumber** , yang telah berkenan menyumbangkan waktunya untuk memberikan informasi yang saya perlukan dalam pembuatan skripsi.
12. **Kepada diri saya sendiri** , terima kasih sudah berjuang sejauh ini, sudah mau berusaha, sudah mau belajar, sudah mau menghadapi berbagai kesulitan yang muncul, tidak patah semangat, dan tidak memilih menyerah dalam menyelesaikan tesis ini yang penuh dengan lika-liku kehidupan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan karunia, limpahan rahmat, dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran membangun yang berkaitan dengan tesis ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Palembang, 20 Desember 2024



Rahmat Hidayat  
NIM.07012622327011

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, mengingat pentingnya peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional. Namun, terdapat gap penelitian dalam mengeksplorasi tantangan implementasi kebijakan kepemudaan secara holistik, khususnya di tingkat daerah, yang mencakup kurang optimalnya pelibatan pemuda sebagai agen perubahan dan kendala struktural dalam pelaksanaan kebijakan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan serta faktor penghambat dan pendukungnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan memanfaatkan teori implementasi kebijakan *hybrid* dari Ripley dan Franklin, yang menggabungkan pendekatan *top down* dan *bottom up*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada beberapa indikator pembangunan pemuda, seperti partisipasi dan kepemimpinan, masih terdapat hambatan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang lemah, dan kurangnya partisipasi pemuda dalam perencanaan kebijakan. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan kepemudaan memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan partisipasi pemuda untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kepemudaan, Peraturan Daerah.

Pembimbing Pertama



Dr. Andries Lionardo, M.Si.  
NIP. 197905012002121000

Pembimbing Kedua



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.  
NIP. 196911101994011001

Koordinator Program Studi  
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.  
NIP. 197805122002121003

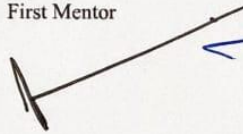


## ABSTRACT

This study was conducted to analyze the implementation of Regional Regulation Number 19 of 2014 concerning Youth at the Youth and Sports Office of South Sumatra Province, considering the importance of the strategic role of youth in national development. However, there is a research gap in exploring the challenges of implementing youth policies holistically, especially at the regional level, which include the less than optimal involvement of youth as agents of change and structural obstacles in policy implementation. The main problem in this study is how the implementation of the policy is carried out and the inhibiting and supporting factors. The purpose of the study was to determine the implementation of the policy and identify the factors that influence its implementation. This study uses a qualitative descriptive approach and utilizes Ripley and Franklin's hybrid policy implementation theory, which combines top-down and bottom-up approaches. The results of the study indicate that although there has been an increase in several indicators of youth development, such as participation and leadership, there are still significant obstacles, such as budget constraints, weak cross-sector coordination, and lack of youth participation in policy planning. In conclusion, the successful implementation of youth policies requires synergy between the government and the community, increased resource capacity, and strengthened youth participation to create more relevant and effective policies.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kepemudaan, Peraturan Daerah.

First Mentor



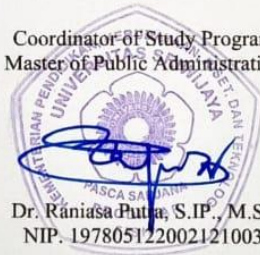
Dr. Andries Lionardo, M.Si.  
NIP. 197905012002121000

Second Mentor



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.  
NIP. 196911101994011001

Coordinator of Study Program  
Master of Public Administration



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.  
NIP. 197805122002121003

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Semuanya Akan Baik-Baik Saja Selama Allah Bersama Kita.”**

**Dengan ridho Allah SWT., Tesis ini saya persembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan.**
- 2. Saudaraku, Sri Haryani, Lismawati, Firmansyah.**
- 3. Almamaterku Pascasarjana Universitas Sriwijaya.**
- 4. Teman seperjuanganku (Magister Administrasi Publik 2022).**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	19
1.4.2 Manfaat Praktis .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
2.1 Landasan Teori .....	22
2.1.1 Kebijakan Publik.....	22
2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	23
2.1.3 Model-model Implementasi Kebijakan.....	27
2.2 Model Implementasi yang digunakan .....	37
2.3 Kepemudaan.....	41
2.4 Penelitian Terdahulu.....	44
2.5 Kerangka Berpikir .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>

3.1 Jenis Penelitian.....	61
3.2 Definisi Konsep.....	62
3.3 Fokus Penelitian.....	64
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	66
3.5 Unit Analisis Data.....	69
3.6 Informan Penelitian.....	69
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.8 Teknik Analisis Data.....	71
3.9 Instrumen Penelitian.....	73
3.10 Keabsahan Data.....	75
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	78
4.1.1 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	78
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	79
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	81
4.1.4 Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	83
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	83
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	92
5.2 Top Down, Perspektif Compliance (kepatuhan) pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	93
5.2.1 Perilaku Implementor pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	94
5.2.2 Pemahaman Implementor pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	10

5.3 Bottom Up, Perspektif what's happening (apa yang terjadi) pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	10
8	
5.3.1 Aktor-aktor yang terlibat pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	10
9	
5.3.2 Kejelasan tujuan dan sasaran Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	11
8	
5.3.3 Perkembangan dan Kerumitan Program pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	13
0	
5.3.4 Partisipasi pihak lain pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	14
0	
5.3.5 Faktor-faktor yang tidak terkontrol pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	13
5	

5.4 Matriks Hasil Temuan Penelitian	13
6	
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>15</b>
8	
6.1 Kesimpulan	15
8	
6.2 Saran	15
8	
6.2.1 Saran Teoritis	15
8	
6.2.2 Saran Praktis	15
8	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>15</b>
9	
<b>LAMPIRAN</b>	<b>18</b>
0	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 17 Tujuan dari <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	2
Gambar 1.2 <i>Framework</i> Pembangunan Pemuda.....	6
Gambar 1.3 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan 2021 .....	7
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	17
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III .....	19
Gambar 2.3 Piramida teori dan model implementasi kebijakan .....	22
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir .....	33
Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data Menurut Miles dan Huberman .....	41
Gambar 4.1 Lokasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan .....	45
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.....	49
Gambar 5.1 Keputusan Gubernur pembentukan tim teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kewirausahaan pemuda.....	70
Gambar 5.2 Surat Keputusan Penunjukkan Panitia Pelatihan Kewirausahaan Pemuda .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pemuda di Sumatera Selatan 2021-2023 .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	37
Tabel 5.1 Matriks Hasil Temuan Penelitian .....	79



## DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SMERU	: <i>Social Monitoring and Early Response Unit</i>
IDN	: Indonesia Millennial
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda :
Renstra	: Rencana Strategis
Perda	: Peraturan Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PISA	: <i>Programme for International Student Assessment</i>
TIMMS	: <i>Trends Internationa Mathematics and Science Study</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Tesis
2. Surat Izin Penelitian
3. Foto Kegiatan Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Keputusan
6. Kerangka Acuan Kerja
7. Lembar Konsultasi
8. Lembar Matriks
9. Undangan Ujian
10. Hasil Turnitin
11. LOA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketangguhan suatu negara dapat dilihat dari kualitas pemudanya. Pemuda merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara yang kuat. Keterlibatan mereka sebagai agen perubahan (*agent of change*) memiliki peran yang sangat strategis dalam masyarakat. Generasi muda memegang peran penting karena mereka memiliki kemampuan unggul, semangat tinggi, daya saing yang kuat, pemikiran yang cepat, serta fisik yang bugar dan cekatan.

Pemuda adalah elemen vital dalam setiap perjuangan bangsa dan negara. Sejarah membuktikan bahwa pemuda selalu menjadi harapan dalam membawa perubahan. Mereka memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi dunia terhadap suatu bangsa, sekaligus menjadi tolok ukur dan tumpuan generasi sebelumnya. Dengan gagasan besar, wawasan luas, serta berpegang pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, pemuda berkontribusi melanjutkan dan mengembangkan pembangunan bangsa dan negara.

Keberadaan pemuda di Indonesia merupakan aset berharga yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan bangsa yang lebih baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah pemuda di Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun mencapai sekitar 64 juta jiwa, atau sekitar 24% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pemuda memiliki peran strategis dalam berbagai aspek pembangunan, baik itu sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dengan semangat yang tinggi, pemuda dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan perubahan dan kemajuan bangsa. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut,

pemuda membutuhkan perhatian, bimbingan, dan arahan yang tepat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Perkembangan menuju kedewasaan yang dialami oleh pemuda harus diarahkan pada hal-hal positif agar mereka dapat menghadapi tantangan global dan bersaing dengan bangsa lain. Proses ini melibatkan penguatan karakter, peningkatan kapasitas, serta pemberdayaan potensi yang ada pada diri pemuda. Tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan dan pengembangan diri pemuda. Data BPS menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% pemuda Indonesia yang memiliki akses pendidikan tinggi, sementara selebihnya menghadapi tantangan akses pendidikan dan keterbatasan keterampilan.

Masalah-masalah yang dihadapi pemuda, seperti keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan keterampilan, memerlukan perhatian serius. Di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka pada pemuda usia 18-24 tahun tercatat mencapai 20,76% pada tahun 2023. Program-program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan wirausaha, harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan dari semua pihak, agar pemuda Indonesia dapat berkembang sesuai dengan harapan dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Pemuda tidak hanya melakukan pengembangan pada pembangunan nasional saja, tetapi pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Pengimplementasikan *Sustainable Development Goals* melalui dukungan dan peran anak muda yang dipercaya dapat membantu percepatan

pencapaian dan tujuan *SDGs*. Adapun tujuan dari *SDGs* adalah dapat digambarkan sebagai berikut ;



**Gambar 1.1 17 Tujuan Dari *Sustainable Development Goals (SDGs)*.**  
*Sumber: SDGs Indonesia.*

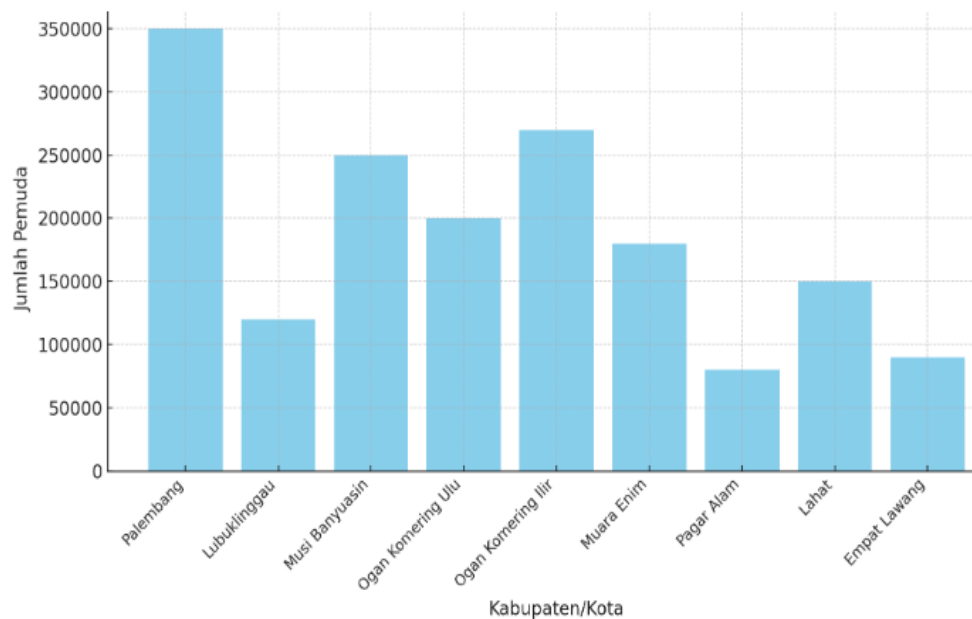
Pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* dengan mengadopsi hasil kesepakatan *Sustainable Development Goals* melalui dukungan dan peran pemuda yang dipercaya dapat membantu percepatan pencapaian *SDGs*.

**Tabel 1.1 Jumlah Pemuda di Sumatera Selatan (2021-2023).**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pemuda (16-30 Tahun)</b>	<b>Persentase dari Total Penduduk (%)</b>
2021	2.280.000	27.5
2022	2.310.000	27.6
2023	2.350.000	27.8

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, 2023.*

Tabel di atas menunjukkan jumlah pemuda berusia 16-30 tahun di Sumatera Selatan selama tiga tahun terakhir. Data ini mencerminkan adanya pertumbuhan jumlah pemuda setiap tahunnya, dengan peningkatan rata-rata sebesar 1,5% per tahun. Pada tahun 2023, jumlah pemuda mencapai 2,35 juta jiwa, atau sekitar 27,8% dari total penduduk di provinsi tersebut serta keterlibatan aktif pemuda menjadi penentu dalam tercapainya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* demi menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Dari total populasi dunia saat ini yang diperkirakan mencapai 7,5 miliar penduduk, 16% diantaranya atau sekitar 1,2 miliar penduduk merupakan pemuda berusia antara 16 hingga 30 tahun. Adapun grafik dari pertumbuhan yang dapat menggambarkan data pemuda di Provinsi Sumatera Selatan;



**Gambar 2.1 Grafik Jumlah Pemuda di Sumatera Selatan per Kabupaten/Kota**  
*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023*

Grafik menunjukkan distribusi jumlah pemuda di Sumatera Selatan, dengan Palembang memiliki jumlah tertinggi sekitar 350.000, diikuti oleh Musi Banyuasin (250.000) dan Ogan Komering Ilir (270.000), mencerminkan potensi besar untuk pembangunan. Daerah seperti Muara Enim (180.000) dan Lahat (150.000) memiliki jumlah pemuda moderat, sementara Pagar Alam (80.000) dan Empat Lawang (90.000) menunjukkan angka yang lebih rendah, membutuhkan perhatian lebih untuk pemberdayaan. Data ini dapat digunakan untuk merencanakan program kepemudaan yang lebih efektif dan merata.

Jumlah pemuda yang signifikan menjadi potensi besar bagi pembangunan bangsa. Dengan pembekalan keterampilan yang tepat, mereka dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Indonesia. Pemuda memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan utama pembangunan berkelanjutan, seperti perubahan iklim, pengangguran, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, konflik, dan migrasi.

Hal ini sejalan dengan karakteristik pemuda yang dianggap penting untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), sebagaimana disampaikan oleh PBB, yaitu: Pemikir Kritis (*critical thinkers*), Pembuat Perubahan (*change-makers*), Inovator, Komunikator, dan Berjiwa Pemimpin (*leaders*).

Sesuai dengan prinsip inklusivitas *SDGs* bahwa tidak ada satupun yang tertinggal (*no one left behind*), pemuda menjadi bagian dalam target pencapaian *SDGs*. Namun, posisi pemuda diharapkan tidak hanya sebagai target/penerima manfaat, tetapi dapat dioptimalkan sebagai subjek/pelaku pembangunan. Hal ini sangat tepat dalam menggambarkan semangat *no one left behind*. Sebagai penerima manfaat pembangunan, kondisi pemuda sangat relevan dengan poin-poin dalam *SDGs*.

Dalam tujuan 4: Pendidikan yang berkualitas; penilaian kualitas pendidikan Indonesia masih rendah berdasar ukuran penilaian global (PISA/ *Programme for International Student Assessment* dan TIMSS/ *Trends International Mathematics and Science Study*) mendapatkan bahwa profil pembelajaran siswa di Indonesia cenderung stagnan selama satu setengah dekade terakhir setelah Reformasi (2000-2014).

Dalam laporan *Baseline Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pemuda* di Indonesia, berdasarkan data dari SMERU *Institute* setidaknya mengaitkan 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan anak muda sebagai target prioritasnya yang artinya sebagai pelaku, anak muda punya potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Sifat pemuda yang selalu ingin tahu, rasa penasaran yang tinggi, kemauan belajar yang besar, membuatnya berpotensi dalam mendukung Tujuan 4: Pendidikan yang berkualitas. Pemuda juga optimistis dalam memandang keberagaman. Menurut IDN *Research Institute* dalam *Indonesia Millennial Report* 2019, 81.5% pemuda Indonesia mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 81.4% mendukung Pancasila sebagai ideologi negara.

Fenomena ini sejalan dengan Tujuan *SDGs* 10: Berkurangnya Kesenjangan dan Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Selain itu, data menunjukkan bahwa 79% pemuda Indonesia memeriksa ponsel pintar mereka dalam satu menit setelah bangun tidur, mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada teknologi. Ketergantungan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan teknologi yang berkontribusi pada Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan memanfaatkan potensi mereka dalam teknologi, inovasi, dan partisipasi aktif, pemuda dapat secara signifikan mendukung berbagai indikator *SDGs*,



mulai dari aspek sederhana hingga kontribusi yang lebih kompleks dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, khususnya di Sumatera Selatan, karena mereka merupakan kelompok usia produktif yang memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor. Melalui pemberdayaan pemuda, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan pengembangan kapasitas, pemuda dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Dengan perhatian khusus terhadap pendidikan, pelatihan, dan akses pekerjaan yang layak, pemuda dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan jumlah pemuda ini menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif dan program-program yang memberdayakan potensi pemuda untuk menjadi agen perubahan di Sumatera Selatan dan di tingkat nasional.

Pemuda merupakan kelompok usia yang berada dalam periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Kepemudaan di Indonesia dibangun atas asas-asas dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, dan demokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang mampu berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Namun, pemuda di Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat potensinya. Sekitar 42% pemuda di wilayah ini menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Tantangan ini menghambat mereka untuk berkembang secara optimal dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pengembangan bakat, kemampuan, dan minat pemuda

dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan dan teknologi, sangat diperlukan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemuda melalui kebijakan yang mendukung kesadaran dan pemberdayaan mereka. Program-program kewirausahaan, peningkatan akses pendidikan, serta pelatihan keterampilan merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup pemuda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat kapasitas pemuda. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang holistik, pemuda Sumatera Selatan dapat menjadi aset yang berharga bagi pembangunan daerah dan bangsa Indonesia.

Salah satunya melalui pengembangan berbagai potensi positif yang dimiliki para pemuda seperti bakat, kemampuan dan minat sangatlah diperlukan supaya lebih bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya salah satu upaya penanganan masalah tersebut tidak hanya sebatas tanggung jawab masyarakat semata tetapi tanggungjawab masyarakat bersama pemerintah melalui suatu kebijakan yang tepat.

Kondisi secara umum kepemudaan di Sumatera Selatan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan alat ukur untuk memotret keberhasilan pembangunan kepemudaan yang merujuk pada 5 (lima) domain IPP yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi.

Adapun analisis terkait kebijakan pemerintah memengaruhi pemuda laki-laki dan perempuan secara berbeda karena perbedaan kebutuhan, peluang, dan tantangan yang mereka hadapi, sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Dalam pendidikan, pemuda laki-laki cenderung diarahkan pada bidang teknis atau sains, sementara perempuan sering menghadapi hambatan akses, terutama di daerah yang membatasi peran perempuan. Di sektor ekonomi, kebijakan penciptaan lapangan kerja lebih banyak mendukung sektor formal yang didominasi laki-laki, sementara perempuan sering terbatas pada pekerjaan informal atau kewirausahaan kecil dengan akses terbatas pada modal. Dalam bidang kesehatan, pemuda perempuan lebih banyak mendapat perhatian pada isu reproduksi, sedangkan laki-laki sering kekurangan dukungan untuk kesehatan mental. Partisipasi dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan ketimpangan, di mana laki-laki lebih didorong untuk terlibat dalam politik atau organisasi formal, sedangkan perempuan menghadapi hambatan struktural meskipun ada kebijakan yang mencoba meningkatkan keterwakilan mereka. Selain itu, norma sosial yang menekan laki-laki sebagai penyokong utama keluarga sering tidak diperhitungkan dalam kebijakan, sehingga mereka lebih rentan terhadap tekanan ekonomi, sementara diskriminasi budaya membatasi mobilitas perempuan. Oleh karena itu, kebijakan yang netral gender sering kali gagal mengatasi kesenjangan ini, sehingga diperlukan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik pemuda laki-laki dan perempuan untuk memastikan manfaat yang setara dan mendukung pembangunan yang berkeadilan.

Kehadiran Indeks IPP dijadikan rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia sekaligus menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan. Mengingat Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, maka percepatan pembangunan melalui peran pemuda dirasa sangat penting (IPP,2022).



**Gambar 1.2 Framework Pembangunan Pemuda**  
*Sumber: Renstra Dispora, 2022.*

Nilai IPP Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 7 poin, dari 42,17 pada 2015 menjadi 49,17 pada 2018. Peningkatan yang signifikan ini tercatat sebagai peningkatan kedua terbesar di Indonesia setelah NTB. Dengan peningkatan yang cukup signifikan tersebut, IPP Provinsi Sumatera Selatan naik dari peringkat ke-34 (posisi terendah) pada 2015 menjadi ke-29 pada 2018. Peningkatan nilai IPP Provinsi Sumatera Selatan terjadi karena adanya peningkatan nilai indeks pada semua domain. Nilai indeks domain pendidikan naik terutama karena naiknya angka partisipasi perguruan tinggi dari 18,60% menjadi 26,23%. Naiknya nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan didorong oleh angka remaja hamil yang turun dari 31,13% menjadi 14,55%.

(a) Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Sumatra Selatan 2020 dan 2021



**Gambar 3.1 Grafik Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Selatan pada 2021.**

*Sumber : Indek Pembangunan Pemuda, 2022.*

Dapat dilihat dari gambar di atas nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja naik setelah angka pengangguran pemuda turun dari 14,78% menjadi 11,20%. Peningkatan nilai indeks pada domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi didorong oleh meningkatnya capaian semua indikator. Meski nilai indeks semua domain meningkat, pembangunan pemuda di Provinsi Sumatra Selatan masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, proporsi pemuda wirausaha kerah putih masih kecil dan capaiannya turun dari 0,19% pada 2015 menjadi 0,08% pada 2018. Kedua, proporsi pemuda yang merokok masih besar (29%) dan berada di atas angka nasional (26%).

Meskipun terjadi peningkatan pada beberapa indikator pembangunan pemuda di Provinsi Sumatera Selatan, seperti penurunan angka pengangguran pemuda dari 14,78% menjadi 11,20%, serta peningkatan nilai indeks pada domain partisipasi dan kepemimpinan dan gender dan diskriminasi, masih terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi. Pertama, proporsi pemuda yang berwirausaha di sektor profesional

masih sangat kecil dan mengalami penurunan dari 0,19% pada 2015 menjadi 0,08% pada 2018. Kedua, angka perokok di kalangan pemuda masih tinggi, yakni 29%, yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 26%. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengembangan wirausaha pemuda dan penanggulangan masalah kesehatan terkait merokok. Hal ini penting untuk dilakukan demi meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan pemuda, sesuai dengan amanat Perda No. 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan, yang mengarah pada penguatan kapasitas dan kualitas hidup pemuda sebagai salah satu pilar pembangunan daerah.

Secara normatif merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pada undang-undang ini menegaskan bahwa “Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional”. Membuat kebijakan publik mengenai kepemudaan merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan kepemudaan, apabila sebelumnya belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur akan eksistensi pemuda, maka dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dapat memberikan gambaran serta garis besar dengan mencakup kepastian hukum apa yang harus dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat terhadap eksistensi pemuda.

Mengingat Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda Pasal 4 “Sentra pemberdayaan pemuda bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Mengingat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pasal 6 “Pemerintah provinsi bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah”, berdasarkan pasal tersebut bahwasannya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan kebijakan pengembangan potensi kepemudaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui Pasal 12 ayat 2 c “Lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda.” Disini ditekankan dalam kegiatan penyadaran dan pemberdayaan kepemudaan pada kegiatan kewirausahaan dikalangan pemuda. Adapun salah satu program pemberdayaan pemuda yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yaitu program pelatihan kewirausahaan.

Kewirausahaan merupakan salah satu dimensi penting dalam membentuk jiwa pemuda di Indonesia. Wirausaha muda merupakan salah satu dimensi penting dalam membentuk jiwa pemuda di Indonesia, wirausaha pemuda perlu dikembangkan untuk mendorong kemandirian pemuda dibidang ekonomi, mengingat tingkat pengangguran di Indonesia ssat ini masih cukup tinggi.

Untuk itu melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dengan harapan dapat memotivasi para pemuda di Provinsi Sumatera Selatan untuk terus berwirausaha sehingga kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga menambah pengetahuan bagi para pemuda mengenai bidang usaha yang diberikan pada pelatihan ini.

Pelatihan kewirausahaan merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan keterampilan berwirausaham menumbuhkan minat dan motivasi berwirausaha hingga memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman terhadap sektor wirausaha (Firdaus dan Hasanah, 2018:273) Pelatihan kewirausahaan pada dasarnya sudah sangat banyak dilakukan tetapi berbagai kalangan. Tidak hanya dilakukan oleh sektor pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi juga oleh berbagai lembaga lain baik kemasyarakatan ataupun organisasi kepemudaan.

Sasaran target pelatihan kewirausahaan pemuda adalah pemuda yang berusia 16-30 tahun dan berasal dari keluarga kurang mampu yang akan memulai usaha atau membangun, memformulasikan ide usaha dan menyusun rencana usaha dan menyusun rencana usaha (*business plan*). Sasaran terhadap peserta pelatihan kewirausahaan pemuda dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan beberapa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota dengan melalui surat permohonan serta lembar kriteria peserta yang sesuai dengan keinginan untuk dikirim sebagai perwakilan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu pelatihan kewirausahaan pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah bidang perbengkelan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut;



**Tabel 2.1 Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Bidang Perbengkelan Tahun 2023.**

<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Peserta</b>
Lahat	4
Palembang	4
Musi Rawas	4
Lubuk Linggau	4
Ogan Ilir	4
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>

*Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan kerangka acuan kerja Dispora 2023*

Berdasarkan data pada tabel 2 dan didukung oleh dokumen kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan diketahui bahwa asal peserta yang dipilih didasarkan pada surat permintaan untuk Kabupaten yang telah ditunjuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan bidang pelatihan yang akan dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam program pelatihan kewirausahaan pemuda tersebut.

Pelatihan kewirausahaan pemuda yang dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ini telah berjalan kurang dari 10 tahun dengan bidang-bidang pelatihan yang berbeda pada tiap tahunnya dan menjadi tugas dari Bidang Pengembangan Pemuda bidang-bidang pelatihan tersebut adalah kursus bidang menjahit, salon kecantikan serta perbengkelan. Pelatihan kewirausahaan ini merupakan bagian sistem pengembangan kewirausahaan pemuda yang dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2011. Berdasarkan petunjuk teknis pelatihan kewirausahaan pemuda di daerah yang dirancang secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah dalam melakukan inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan akan minat, bakat dan potensi yang ada dengan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan serta masyarakat di tiap daerah masing-masing.

Sedangkan secara empiris gejala atau fenomena yang dapat ditemui pada pemuda zaman sekarang, masih terkesan skeptis bahkan apatis terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Pemuda-pemuda saat ini telah terpengaruh dalam hal pergaulan bebas dan kenakalan remaja contohnya ada salah satu kejadian di Sumatera Selatan “Pemuda Sumsel Bawa Lari Pacar sampai Jatim, Hanya Ngekos Berdua dan Tak Bekerja” itu salah satu contoh akibat dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba contoh kasusnya Pemuda Asal Palembang, Di Amankan Satuan Narkoba Polres Oku Atas Kepemilikan 76,06 Gram Ganja ini salah satu contoh dari penyalahgunaan narkoba di akibatkan kurangnya pengetahuan dari pemuda, hedonisme, contohnya sikap berlebihan dalam berpakaian, mengedepankan ego dibandingkan kepentingan dan kurang menghargai kebudayaan sendiri, contohnya berpakai kebarat-baratan, minum alkohol, balapan dan tawuran bahkan kemajuan teknologi yang seharusnya membuat mereka lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi justru malah disalahgunakan.

Permasalahan mental di kalangan pemuda menjadi perhatian serius bagi masa depan bangsa. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui gagasan *Revolusi Mental*, menekankan pentingnya memperbaiki mentalitas masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai penerus pembangunan. Pemuda yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kematangan intelektual, kreativitas, rasa percaya diri, inovasi,

kesetiakawanan sosial, serta semangat nasionalisme yang tinggi untuk mendukung pembangunan nasional.

Generasi muda diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, sekaligus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, pemuda dapat berkontribusi dalam menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan baik antar daerah maupun antar bangsa, sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas pemuda-pemudinya. Ungkapan ini sering didengar di tengah masyarakat sebagai pengingat akan peran strategis generasi muda. Pemuda Indonesia diharapkan memiliki kreativitas, inovasi, daya juang yang tinggi, serta kemandirian. Bangsa yang mandiri akan mendapatkan penghormatan dan mampu sejajar dengan bangsa lain, asalkan didukung oleh generasi muda yang tangguh dan visioner.

Pemuda yang tangguh harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kreativitas, serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan alam dan sosial. Dengan kualitas ini, mereka dapat bersaing di era globalisasi sekaligus menjaga harmoni dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam proses pembangunan bangsa secara nasional pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Diperlukan penanganan khusus dalam menuntaskan masalah ini, karena merupakan suatu upaya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran utama pemerintah melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Bertanggung jawab

melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. maka dipandang penting untuk diadakan penelitian mengenai: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan (Studi Kasus Pelatihan Kewirausahaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan (Studi Kasus Pelatihan Kewirausahaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)?
2. Apa saja faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan (Studi Kasus Pelatihan Kewirausahaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan?

2. Mengetahui dan Menganalisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kepemudaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan studi kepemudaan.

Penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis dalam memahami implementasi kebijakan kepemudaan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

2. Penerapan Teori Implementasi Kebijakan.

Menambah wawasan mengenai penerapan teori implementasi kebijakan, terutama dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan. Hasil penelitian ini dapat memperkuat atau memberikan pembaruan terhadap teori-teori yang relevan.

3. Referensi Studi Kepemudaan.

Memberikan landasan akademik bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mendalami isu kepemudaan, khususnya terkait peran pemuda dalam pembangunan, implementasi kebijakan kepemudaan, dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan pemuda.

#### 4. Kontekstualisasi Kebijakan Publik.

Menyediakan analisis empiris yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan publik diterapkan pada sektor kepemudaan, sehingga dapat menjadi studi kasus dalam mata kuliah kebijakan publik atau administrasi pemerintahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

##### 1. Bagi Pemerintah.

Memberikan informasi dan evaluasi yang dapat menjadi acuan dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan, khususnya oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemuda di daerah.

##### 2. Bagi Pemuda.

Memberikan wawasan kepada pemuda mengenai kebijakan yang telah dibuat untuk mendukung pemberdayaan mereka, sehingga pemuda dapat lebih aktif berpartisipasi dalam program-program kepemudaan dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan.

##### 3. Bagi Peneliti Lain.

Menjadi referensi dan bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kebijakan kepemudaan, baik dalam konteks implementasi kebijakan, pemberdayaan pemuda, maupun dampaknya terhadap pembangunan daerah dan nasional.

4. Bagi Masyarakat.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung pemberdayaan pemuda sebagai aset strategis pembangunan dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program-program kepemudaan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2010). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Jalan Sutra.
- A., Morissan M. dkk.2017. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Agostiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses pada 5 Juli 2024.
- Amsar, M. (2019). *Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Aceh Dalam Membentuk Pemuda Yang Inovatif Di Provinsi Aceh* (Disertasi Doktor, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Barutu, AA (2020). *Peran Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Menciptakan Kepemimpinan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Di Kota Pekanbaru* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Bowman, Ann O'M. 2005. Policy Implementation, dalam Rabin, Jack. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Hal, 209-212. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Ersas A. Gabung T.A.M. Ronny Gosal, Frans Singkoh (2017). *Peran Pemerintah kabupaten Minahasa tenggara melalui dinas pemuda dan olahraga dalam memberdayakan pemuda desa khususnya di desa liwutung sesuai dengan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*. E.Journal Unsrat.ac.id.
- Fischer, F., & Miller, G. J. (Eds.). (2017). *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. Routledge.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Hill, Michael, and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publications.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya, 323.



- Hasibuan, T., & Apriandi, A. (2018). *Faktor Determinan yang Mempengaruhi Minat Wirausaha untuk Mengatasi Pengangguran Intelektual pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Swasta di Kota Medan*. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(3), 192–206. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i3.2399>.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analysis*, Gava Media. Yogyakarta.
- Kraft, Michael E. dan Scott R. Furlong. 2020. *Public Policy : Politics, Analysis, and Alternatives Seventh Edition*. Sage Publication.
- Lester, J. P and Stewart, J, JR. 2000, *Public Policy: An Evolutionary Approach, 2nd edition*. Wadsworth, Belmont.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Edition 3)*. Sage Publication.
- Nugroho, R. 2018. *Public Policy (Edisi 6)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*.
- Prasetya, T., Faozanudin, M., & Puspita, DR (2018). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Spm-Dikdas) Tingkat Smp (Studi Pada Smp N 6 Satu Atap Rembang Dan Smp N 3 Purbalingga)*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia (IIPA)* , 4 (1).
- Permatasari, I. A. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)*. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta:Gava Media.
- Putra, F., & Sanusi, A. (2023). *POLICY RESPONSE ON THE IMPACTS OF COVID 19 PANDEMIC ON UNEMPLOYMENT IN INDONESIA*: Fadillah Putra, Anwar Sanusi, Muhyidin Muhyidin. *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA*, 6(2), 68-83.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

- Suryadi. (2019). *Kewirausahaan dan Pemberdayaan Pemuda Dalam Mengurangi Pengangguran*. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 14(1), 54–67. <http://journals.kemnaker.go.id/index.php/naker/article/view/55>.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Politik*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabet
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.Alfabeta,Bandung.
- Situmorang Chazali. (2016). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Sabatier, Paul. 1986. “*Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*” *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis*.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Wiarse, I. (2019) *Implementasi Kebijakan Kepemudaan Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi*. *Journal Garuda Rujukan Digital* Vol. 7 No. 2.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Press.